



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 19 (*lima belas*)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I dan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT RNI (Persero), PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara (Persero), dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero).
- Hari, Tanggal : Rabu, 5 Februari 2020
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : 1. Perkenalan;
2. Pembahasan isu aktual di masing-masing BUMN, dan
3. Lain-lain.
- Hadir : 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Wakil Menteri BUMN I, Budi Gunadi Sadikin;
3. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso;
4. Plt. Direktur Utama PT Berdikari (Persero), Oksan O.M. Panggabean;
5. Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Agus Andiyani;
6. Direktur Utama PT RNI (Persero), Eko Taufik Wibowo;
7. Direktur Utama PT Pertani (Persero) yang diwakili oleh Direktur Operasional, Lalan Sukmaya,
8. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero), Karyawan Gunarso;
9. Direktur Utama PT Garam (Persero), Budi Sasongko;
10. Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Farida Mokodompit,
11. Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero), M. Yana Aditya;
12. Direktur Utama PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), M. Kuncoro Wibowo, dan
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I, pada pukul 10.27 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 5 Februari 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN Pangan untuk melakukan revitalisasi dan peningkatan kapabilitas dalam mengelola aset perusahaan sehingga berdaya guna dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menyusun *roadmap* dengan melakukan sinergi antar BUMN Pangan dalam membuat strategi untuk perbaikan kinerja perusahaan secara terintegrasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Diperlukan percepatan kemandirian dan kedaulatan pangan yang mampu memanfaatkan semua aset dan infrastruktur yang ada dengan melakukan orkestrasi dan peningkatan kerjasama (gotong royong) semaksimal mungkin untuk mewujudkan Percepatan Kedaulatan Pangan Nasional.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN dan BUMN Pangan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi secara terintegrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, dalam arti ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, keamanan pangan, kemandirian dan keberlangsungan pangan terjamin.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN Pangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan strategi yang berpihak pada rakyat dalam rangka pengembangan petani/peternak/nelayan/petambak kecil sesuai dengan tujuan BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan yang tegas khususnya kepada BUMN Pangan yang berkinerja tidak baik dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan pembinaan agar BUMN Pangan yang ada tetap fokus menjalankan bisnisnya sesuai bidang yang ditangani.
7. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna meninjau ulang peraturan/ketentuan terkait dengan tata niaga garam, gula, sapi, unggas, beras, jagung, bawang putih, dan perikanan dalam rangka peningkatan daya saing dan penyerapan produksi dalam negeri.
8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN bersama dengan BUMN Pangan untuk membuat inovasi agar BUMN Pangan mampu bersaing di pasar internasional sebagai pelaku ekspor.
9. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan BUMN Pangan untuk mengkaji secara detail dan komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi oleh BUMN Pangan beserta solusinya dan membahas kembali dengan Komisi VI DPR RI.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 15.26 WIB.

Jakarta, 5 Februari 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

ARIA BIMA
A-189